

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh seluruh negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Secara singkat, kemiskinan diartikan sebagai rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nurwati (2008:2) menjelaskan “kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidak mampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non income factors*) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi”. Rosyidi (2009:147) membagi definisi kemiskinan menjadi dua, yakni kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif.

Seseorang disebut miskin mutlak jika pendapatannya berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (*poverty line*) untuk Indonesia, menurut definisi Badan Pusat Statistik, adalah sejumlah uang yang dapat dipakai untuk membeli 21.000 kalori setara beras sehari per orang. Dalam pada itu, kemiskinan relatif menyatakan kemiskinan dalam perbandingan dengan keadaan orang atau kelompok lain. Jelasnya, seseorang (atau kelompok) disebut miskin relatif jika dia (atau kelompok itu) lebih miskin dari orang (atau kelompok) lain. Demikian pula, seseorang (atau kelompok) disebut kaya relatif jika dia (atau kelompok itu) lebih kaya dari orang (atau kelompok lain).

Jenis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan Relatif dan kemiskinan Absolute. Kemiskinan Relatif dapat dipengaruhi oleh pakem kebijakan pemerintah dalam membangun perekonomian dimana hasil pemerataan pembangunan ekonomi belum mencapai lapisan masyarakat terbawah sehingga gradasi sejahtera nampak sangat mencolok terkait jumlah

penghasilan dalam standar minimum. Di mana, standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu. Kemiskinan *Absolute* secara *statistic*, kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mecakupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam beentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dalam bentuk jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode, apabila pendapatan tersebut berada dibawah garis yang ditetapkan, maka dapat tergolong kategori miskin. Garis kemiskinan absolute bersifat “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolute mampu membandingkan kemiskinan secara umum, di mana garis kemiskinan absolute akan menjadi sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suat proyek terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan secara alamiah akan terbentuk untuk membandingkan antara satu dan lainnya.

Sebagian masyarakat harus mencari jalan keluar bagaimana mereka mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Bekerja sebagai pedagang pasar, pedagang rumahan atau bahkan PKL adalah sebagian cara mereka agar tetap bertahan hidup. Dalam istilah ekonomi, cabang-cabang usaha tersebut dikenal sebagai sektor informal. Menurut Widodo

(2005 : t.hlm), “Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*)”. Sektor informal memiliki karakteristik seperti dijelaskan oleh Todaro (2013 : 351-352) sebagai berikut : Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak memiliki ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Selain itu, mereka yang berada di sektor informal tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor formal, misalnya tunjangan keselamatan kerja dan pensiun. Motivasi mereka semata-mata terbatas pada upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, agar bisa makan pada hari ini atau esok, dan bukan untuk menumpuk keuntungan dan meraih kekayaan. Sebagian dari mereka tinggal di pusat pemukiman sangat sederhana dan kumuh, yang fasilitas kesejahtraannya (listrik, air bersih, fasilitas pembuangan limbah, transportasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan sangat minim.

Alisjahbana (2006: 3) mengemukakan alasan masyarakat miskin memilih sektor informal sebagai pekerjaan, yaitu : “1) Terpaksa, tidak ada pekerjaan lain; 2) Dampak pemutusan hubungan kerja (PHK); 3) Mencari rezeki halal; 4) Mandiri, tidak bergantung orang lain; 5) Menghidupi keluarga; 6) Pendidikan rendah, modal kecil; dan 7) Kesulitan kerja di desa”. Sektor informal hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, namun hal ini masih menjadi kendala utama bagi para pelaku sektor informal dalam menjalankan usahanya.

Jika pemberian kredit modal usaha dapat digunakan secara benar, maka akan membantu para pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pedagang kecil. Tujuan akhir dari pemberian kredit modal usaha ini adalah, mampu meningkatkan taraf hidup keluarga, serta dapat mengelola usahanya dengan baik. Ukuran keberhasilan usaha tersebut dapat terlihat dari perbandingan sebelum dan sesudah menerima kredit modal usaha terhadap peningkatan omset penjualan usaha, laba usaha, dan ketersediaan barang dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai pengaruh atau manfaat yang diperoleh dari pemberian kredit modal usaha kepada pedagang kecil di pasar. Penelitian ini diangkat dengan judul : **“Pengaruh Pemberian Kredit Modal Terhadap Pedagang Kecil di Pasar Wage Nganjuk”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada pemberian kredit modal terhadap pendapatan pedagang kecil di Pasar Wage Nganjuk?
2. Apakah ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian kredit modal terhadap pedagang kecil di Pasar Wage Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemberian kredit modal usaha kepada para pedagang kecil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pedagang kecil di pasar wage Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pemberian kredit modal terhadap pedagang kecil di Pasar Wage Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek akademis

Digunakan untuk menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan perusahaan yang sesungguhnya.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dari pengetahuan yang telah diterima selama kuliah.

3. Aspek praktis

Digunakan sebagai bahan dokumentasi guna melengkapi bahan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.